

***BEST PRACTICES* DESENTRALISASI POLITIK DI
KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI DAERAH OTONOMI**

BARU (DOB)
UNIVERSITAS ANDALAS

SRIPSI

Diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh:

Mia Santika

BP. 1710832018



Pembimbing :

1. Dr. Asrinaldi, M.Si

2. Dr. Tengku Rika Valentina, MA

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 202

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB). *Best practices* merupakan sebuah cerita keberhasilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Meskipun terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru yang baru berusia 17 Tahun serta dengan penduduk yang heterogen. Kabupaten Dharmasraya mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik. Meskipun dengan kondisi sebagai daerah otonomi baru dan juga merupakan daerah yang heterogen, Kabupaten Dharmasraya mampu mengatasi kendala dan permasalahan tersebut dengan prosedur dan caranya tersendiri. Hal ini dapat dibuktikan melalui pencapaian Kabupaten Dharmasraya melalui berbagai prestasi dan keberhasilan sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB) dilihat dari salah satu prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui beberapa prosedur atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Prosedur dan kebijakan tersebut diantaranya adalah pemerintah Kabupaten Dharmasraya selalu berusaha menjadi penengah atau mediator dalam menengahi permasalahan yang terjadi maupun kepentingan yang berbeda dari masyarakatnya yang heterogen. Prosedur dan kebijakan tersebut antara lain seperti memberlakukan program pemerintahan sesuai dengan visi misi yaitu Mandiri dan Berbudaya, penerapan program pemberdayaan masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan kebudayaan. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya yaitu adanya hubungan atau koordinasi yang baik dengan pemerintah Pusat, serta penerapan kiat khusus berdasarkan pengamalan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Prosedur dan kebijakan tersebut dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen.

Kata kunci: *Best Practices*, Desentralisasi Politik, *Consensus Orientation*.

ABSTRACT

This study discusses how best practices of political decentralization in Dharmasraya Regency as a new autonomous region (DOB). Best practices is a success story in solving a problem. Although there are various problems and obstacles that occur in Dharmasraya Regency as a new autonomous region that is only 17 years old and with a heterogen population. Dharmasraya Regency is able to solve the problem and organize its government well. Although with the condition as a new autonomous region and also a heterogeneous area, Dharmasraya Regency is able to overcome these obstacles and problems with its own procedures and methods. This can be proven through the achievement of Dharmasraya Regency through various achievements and successes as a new autonomous region with a heterogen population. This research was involves by qualitative approach with case study method. This study aims to describe best practices of political decentralization in Dharmasraya Regency as a new autonomous region (DOB) by one of the principles of good governance that is consensus oriented. The results of this study show that best practices of political decentralization in Dharmasraya Regency can be seen through several procedures or policies by the government of Dharmasraya Regency. Such procedures and policies include the Dharmasraya district government always trying to be an intermediary or mediator in mediating problems that occur and different interests of the heterogen society. Such procedures and policies include implementing government programs in accordance by vision and mission Mandiri dan Berbudaya, the implementation of community empowerment programs through community empowerment institutions, and cultural empowerment. In addition, there are several factors supporting the best practices of political decentralization in Dharmasraya Regency, namely the existence of good relations or coordination with the Central government, as well as the application of special tips based on the practice of Pancasila values and the 1945 Law. These procedures and policies by Dharmasraya Regency as an effort to be able to organize good governance in Dharmasraya Regency which is a new autonomous region with heterogen population

Keywords: Best Practices, Political Decentralization, Consensus Orientation.

